

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI
KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN
LAPORAN KEUANGAN**

(Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

DWI SWASANA RAMADHAN

NIM. 12030112130287

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dwi Swasana Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112130287
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI
KETERANDALAN DAN
KETEPATWAKTUAN LAPORAN
KEUANGAN (Studi Kasus di Kabupaten
Banjarnegara)**
Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.

Semarang, 28 Januari 2016

Dosen Pembimbing,

(Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.)

NIP. 19741222 200012 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Dwi Swasana Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112130287
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP NILAI INFORMASI
KETERANDALAN DAN
KETEPATWAKTUAN LAPORAN
KEUANGAN (Studi Kasus di Kabupaten
Banjarnegara)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 10 Maret 2016

Tim Penguji

1. Dr. Haryanto., S.E., M.Si., Ak., CA (.....)
2. Puji Harto., S.E., M.Si., Akt., Ph.D (.....)
3. Adityawarman., S.E., M.Acc., Ak (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dwi Swasana Ramadhan, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan (Studi Kasus Di Kabupaten Banjarnegara)** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 28 Januari 2016
Yang membuat pernyataan,

(Dwi Swasana Ramadhan)
NIM: 12030112130287

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu*

(QS Muhammad : 7)

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya.

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ibu, Bapak beserta keluarga besar yang tercinta dan tersayang

ABSTRACT

This study aims to examine the financial statements with the value of information in the case study is the district of Banjarnegara. Independent variables in this study consists of three variables: the competence of human resources, utilization of information technology and internal control systems. The dependent variable in this study are the reliability and timeliness.

This research is a quantitative research using primary data were taken directly from the source. The object of this research that all work units (SKPD) in the district of Banjarnegara numbering 65. The respondents in this study is one of financial management officer at each of these institutions. This study uses a questionnaire which uses a scale of 1-5 likert.

The results showed that the capacity of human resources has no significant effect on the dependent variable: reliability and timeliness of financial reporting information. Not significantly influential human resource capacity in the district of Banjarnegara because many parts of the financial management still lacks capacity in the field of accounting. While the use of information technology and internal control system has a significant and positive effect on the dependent variable: reliability and timeliness of financial reporting information. Influential utilization of information technology and internal control system significantly due to information technology in the district Banjarnegara is good and the strong control on every working units (SKPD). However, overall the human resource capacity, utilization of information technology, and internal control system together have a significant and positive effect on the dependent variable, namely the reliability and timeliness of the information value of financial statements.

Keywords: Financial reports, the value of information.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji nilai informasi laporan keuangan dengan studi kasus di Kabupaten Banjarnegara. Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu: kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu keterandalan dan ketepatan waktu.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diambil langsung dari sumbernya. Objek penelitian ini yaitu seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 65. Responden pada penelitian ini yaitu 1 pejabat pengelola keuangan pada setiap instansi tersebut. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang mana menggunakan skala liker 1-5.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kedua variabel dependen yaitu keterandalan dan ketepatan waktu nilai informasi laporan keuangan. Tidak berpengaruh secara signifikan kapasitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Banjarnegara dikarenakan banyak bagian pengelola keuangan yang masih kurang memiliki kapasitas dalam bidang akuntansi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel dependen keterandalan dan ketepatan waktu nilai informasi laporan keuangan. Berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern secara signifikan dikarenakan teknologi informasi di wilayah Kabupaten Banjarnegara sudah baik dan adanya kontrol yang kuat pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun, secara keseluruhan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel dependen yaitu keterandalan dan ketepatan waktu nilai informasi laporan keuangan.

Kata kunci: laporan keuangan, nilai informasi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Banjarnegara)”. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seseorang yang harus dijadikan panutan umat manusia karena keteladanannya yang luar biasa.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Skripsi ini juga menjadi wujud syukur penulis atas ilmu yang telah didapatkan hingga saat ini.

Dalam penelitian ini, penulis banyak menemui rintangan dan hambatan. Namun, alhamdulillah penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik juga berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada,

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak Fuad, S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan dosen wali.
 3. Bapak Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Ak., CA.. yang telah berkenan dan sabar menjadi pembimbing skripsi hingga ke titik akhir.
 4. Ibu dan Bapak dosen yang telah banyak memberikan ilmu dan nasihat selama menempuh pendidikan sarjana
 5. Segenap karyawan tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
 6. Keluarga yang tercinta dan tersayang Ibu Restu Utami, Mbak Handani Maheresmi, Nugraheni Puspita Rini, dan Nugroho Wira Husada yang telah memotivasi dalam kehidupan ini secara moral maupun materiil
 7. Seluruh kawan-kawan selama menjalani kehidupan mahasiswa yang telah menciptakan kenangan yang terlukis indah dalam kanvas kehidupan
- Tiada gading yang tak retak, begitulah kata pepatah yang sesuai dengan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun semoga dapat melengkapi dan menjadikan penelitian selanjutnya lebih baik.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dalam skripsi ini karena berbagai keterbatasan dan ketidaktahuan penulis. Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Penulis,

Dwi Swasana Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	19
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	20
1.4. Sistematika Penelitian	20
BAB II TELAAH PUSTAKA	22
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	22
2.1.1 Teori Agensi.....	22
2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>).....	23
2.1.3 Pemerintah Daerah	24
2.1.4 Laporan Keuangan Sektor Publik.....	27
2.1.5 Nilai Informasi	29
2.1.6 Teknologi Informasi.....	31
2.1.7 Sumber Daya Manusia.....	33

2.1.8 Sistem Pengendalian Intern	35
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37
2.4 Pengembangan Hipotesis	41
2.4.1 Pengaruh Hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Nilai Informasi (Keterandalan dan Ketepatanwaktuan) Laporan Keuangan	41
2.4.2 Pengaruh Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi (Keterandalan dan Ketepatanwaktuan) Laporan Keuangan.....	44
2.4.3 Pengaruh Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi (Keterandalan dan Ketepatanwaktuan) Laporan Keuangan	46
2.4.4 Hubungan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Secara Bersama Berpengaruh terhadap Nilai Informasi (Keterandalan dan Ketepatanwaktuan) Laporan Keuangan.	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	50
3.1.1 Variabel Penelitian	50
3.1.2 Definisi Operasional.....	50
3.2 Populasi dan Sampel	58
3.3 Jenis dan Sumber Data	59
3.4 Metode Pengumpulan Data	60
3.5 Metode Analisis Data	60
3.5.1 Uji Kompetensi Data.....	60
3.5.2 Mengolah Data.....	62
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	62
3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
3.5.5 Uji <i>Goodness of Fit</i>	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	67
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	67
4.2. Analisis Data	69
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif	70

4.2.2. Uji Reliabilitas	72
4.2.3. Uji Validitas	75
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	80
4.2.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....	90
4.2.6 Uji <i>Goodness of Fit</i>	93
4.3. Pembahasan	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Keterbatasan penelitian	108
5.3 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Perbedaan Laporan Keuangan yang Dihasilkan..... 4
Tabel 1.2	Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2015 11
Tabel 1.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015.. 12
Tabel 1.4	Pernyataan Opini Hasil Pemeriksaan BPK..... 12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu..... 38
Tabel 4.1	Karakteristik Responden 67
Tabel 4.2	Analisis Statistik Deskriptif..... 70
Tabel 4.3	Uji Reliabilitas Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia..... 72
Tabel 4.4	Uji Reliabilitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 72
Tabel 4.5	Uji Reliabilitas Variabel Sistem Pengendalian Intern 73
Tabel 4.6	Uji Reliabilitas Variabel Keterandaan 73
Tabel 4.7	Uji Reliabilitas Variabel Ketepatanwaktuan 73
Tabel 4.8	Uji Validitas Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia..... 76
Tabel 4.9	Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 76
Tabel 4.10	Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern 77
Tabel 4.11	Uji Validitas Variabel Keterandalan 77
Tabel 4.12	Uji Validitas Variabel Ketepatanwaktuan..... 77
Tabel 4.13	Uji Multikolonieritas model I 81
Tabel 4.14	Uji Multikolonieritas model II..... 81
Tabel 4.15	Uji Autokorelasi model I..... 83
Tabel 4.16	Uji Autokorelasi model II..... 83
Tabel 4.17	Uji Normalitas Model I 88
Tabel 4.18	Uji Normalitas Model II 88

Tabel 4.19	Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model I	90
Tabel 4.20	Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model II	90
Tabel 4.21	Uji Determinasi Model I.....	94
Tabel 4.22	Uji Determinasi Model II	94
Tabel 4.23	Uji Statistik F Model I.....	95
Tabel 4.24	Uji Statistik F Model II.....	96
Tabel 4.25	Uji Statistik T Model I.....	97
Tabel 4.26	Uji Statistik T Model II	98
Tabel 4.27	Hasil Hipotesis.....	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Model I	41
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Model II	41
Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas model I.....	85
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas model II	85
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas model I	87
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas model II	87
Gambar 4.6. Skema Akad Murabahah yang Dijalankan oleh Bank Muamalat.....	96
Gambar 4.7. Foto Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Tahun 2014.....	135

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner Penelitian.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang digulirkan tahun 1998 membawa banyak perubahan yang signifikan dalam bidang akuntansi pemerintahan (Priyonno, 2012). Perubahan tersebut tidak lepas dari reformasi di bidang keuangan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* serta pencatatan akuntansi berbasis kas yang berubah menjadi pencatatan berbasis kas menuju akrual serta berubah menjadi pencatatan akuntansi berbasis akrual.

Mardiasmo(2011) menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini adalah menguatnya akuntabilitas publik terhadap lembaga-lembaga publik yang berada di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 telah menjelaskan tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu bentuk dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Sementara, laporan kinerja instansi pemerintah daerah merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dan kinerja

instansi pemerintah daerah ini menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur sehingga dapat menjelaskan kinerja dan tanggung jawab pengelolaan anggaran keuangan selama satu periode tertentu.

Pengelola keuangan daerah merupakan badan atau dinas atau biro keuangan atau bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sedangkan, satuan kerja perangkat daerah adalah lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja.

Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan (pemerintah daerah) wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan pemerintah daerah dan bendahara umum daerah setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara, laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Dalam penyusunan laporan keuangan dijelaskan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006. Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan menyampaikannya kepada

kepaladaerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikannya kepada kepala daerah. Laporan keuangan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait standar akuntansi pemerintah (SAP) yang termaktub dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menggantikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi akrual penuh (*full accrual accounting*) serta tidak ada lagi yang menerapkan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash towards accrual*) dengan selambat-lambatnya tahun 2015. Sehingga tahun 2015 ini merupakan tahun dimana seluruh sistem keuangan pemerintahan menggunakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Jumlah dan jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 yang menjelaskan standar akuntansi kas menuju akrual dengan peraturan pemerintah 71 tahun 2010 juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan Laporan Keuangan yang Dihasilkan

No	Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual	Laporan Keuangan Berbasis Akrual
1	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran
2	Neraca	Neraca
3	Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas
4	Catatan Atas Laporan Keuangan	Catatan Atas Laporan Keuangan
5	-	Laporan Operasional
6	-	Laporan Perubahan SAL
7	-	Laporan Perubahan Ekuitas

Sumber: Priyono (2012)

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari suatu pemerintahan membutuhkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan. Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*).

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan akan mengukur kinerja yang telah atau yang akan dilakukan oleh pemerintah. Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, terdapat empat kelompok utama yang membutuhkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Empat kelompok utama tersebut, yaitu: masyarakat; wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; pemerintah. Dalam *statement* nomor 34 *Governmental Accounting Standards Board (1999)* tentang *Objectives of Financial Reporting* menjelaskan bahwa Pemerintah harus melaporkan kepada masyarakat, dewan

perwakilan serta pemberi dana sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari pemerintahan.

Asshiddiqie (2009) menyatakan bahwa kedaulatan rakyat, yaitu satu ajaran yang memandang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula. Oleh karena itu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus menerima laporan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Banyak pihak yang membutuhkan dan mengandalkan informasi dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Sehingga, informasi dari laporan keuangan haruslah memiliki akuntabilitas. Dalam *statement* nomor 34 *Governmental Accounting Standards Board (1999)* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa laporan keuangan dapat mencakup informasi-informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi di dalamnya terdiri a). Perbandingan hasil keuangan secara faktual dengan anggaran yang telah diputuskan secara legal, b). Menilai kondisi keuangan dan hasil dari operasi usaha, c). Membantu dalam menentukan hubungan antara keuangan dengan hukum dan peraturan serta, d). Membantu dalam mengukur efisiensi dan efektivitas.

Tentu, untuk mencapai akuntabilitas dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Laporan yang dihasilkan oleh pemerintah haruslah memiliki nilai informasi yang baik dengan bentuk ketepatanwaktuan laporan keuangan yang dibuat dan dipublikasi serta dapat diandalkan. Selain itu, perlu faktor-faktor yang menunjang laporan keuangan dapat memiliki nilai informasi

yang baik seperti kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam membuat laporan keuangan, pemanfaatan teknologi yang mendukung serta sistem pengendalian intern.

Suwardjono(2005) mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Peraturan pemerintah nomor. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa informasi yang disajikan oleh pemerintah harus dapat dipahami oleh semua kelompok sehingga laporan keuangantidak hanya untuk kelompok tertentu saja. Laporan keuangan yang disajikan setidaknya mencakup elemen laporan keuangan serta jenisnya yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah wajib memperhatikan nilai informasi dalam laporan keuangan yang disajikan agar dapat digunakan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 telah menjelaskan secara detail karakteristik dari laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan akan menentukan nilai dari informasi laporan keuangan tersebut. terdapat empat karakteristik agar laporan keuangan dapat sesuai dengan kualitas yang baik. Empat karakteristik tersebut yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dapat mengevaluasi dan membandingkan laporan keuangan masa lalu dan masa kini serta dapat memprediksi masa depan. Informasi dapat dikatakan

relevan apabila memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap.

2. Andal

Laporan keuangan yang andal merupakan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan material, tidak menyesatkan, jujur sesuai fakta, dan dapat diverifikasi. Informasi dapat dikatakan andal jika penyajian jujur, dapat diverifikasi, netral.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dikatakan dapat dibandingkan apabila laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dapat dibandingkan di tempat lain juga.

4. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan dapat dipahami apabila laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh pengguna serta menggunakan istilah-istilah yang sesuai dengan tingkat keahaman pengguna.

Kebermanfaatan (*usefulness*) merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi (Indriasaridan Nahartyo 2008). Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang sangat penting bahwa laporan keuangan harus memiliki kebermanfaatan serta nilai informasi yang baik.

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 menjelaskan bahwa salah satu upaya konkrit dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan di Indonesia yaitu dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan negara secara tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

Laporan pertanggungjawaban keuangan negara terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6 bulan setelah diperiksa. Kemudian munculah pertanyaan, apakah dalam praktiknya laporan pertanggungjawaban keuangan telah dilakukan secara tepat waktu dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah? Atau apakah laporan keuangan tersebut telah disampaikan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Banyak berita yang membahas laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah daerah menarik untuk dilakukan kajian maupun penelitian. Berikut merupakan beberapa contoh kasus nyata pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang telah disajikan.

- *“Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sebanyak 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan,” jelas Ketua BPK Harry Azhar Aziz saat menyampaikan sambutan dalam agenda penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2015 dari BPK kepada DPR RI di sidang paripurna ke-6 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/10). Permasalahan tersebut meliputi 7.890 atau 51,12 persen merupakan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun, dan 7.544 atau 48,88 persen permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Harry mengungkapkan dari masalah ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.609*

permasalahan berdampak pada pemulihan keuangan negara, daerah dan perusahaan (atau berdampak financial) senilai Rp 21,62 triliun. (Republika.co.id 5 oktober 2015)

- *Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan hanya ada 33% pemda yang tertib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Data tersebut diperoleh setelah mendapatkan keluhan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Data 33% itu laporan BPK dan KPK. Banyak laporan pertanggungjawaban keuangan daerah ke Kemendagri masih bermasalah," (Sindonews.com 14 November 2014)*
- *Jadi, laporan keuangan kita masih bermasalah dalam hal tata kelola, belum sampai ke upaya penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat. Padahal, jelas di Undang-Undang Dasar, selain tata kelola, keuangan negara juga harus untuk kemakmuran rakyat," kata Ketua BPK RI Harry Azhar Azis di Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (4/5/2015). Berdasarkan hasil pemeriksaan periode terakhir dari BPK, kata Harry, sebanyak 156 dari 524 pemerintah daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Yang fantastis, kata dia, sebanyak 280 pemerintah daerah memiliki laporan keuangan yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, salah satunya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Kompas.com 4 Mei 2015)*

Kejadian pada kasus-kasus tersebut menandakan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan memiliki nilai informasi yang kurang memiliki akuntabilitas. Terbukti dengan masih banyaknya membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang. Padahal keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur penting agar nilai informasi pada laporan keuangan menjadi baik.

Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan empat jenis opini terhadap laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh pemerintah. Empat opinitersebut yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) (BPK, 2011).

Opini wajar tanpa pengecualian diberikan apabila sistem pengendalian internal di dalam suatu pemerintahan sudah baik dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Opini wajar dengan pengecualian diberikan apabila sistem pengendalian internal pada suatu pemerintah memadai, namun masih terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian masih dapat diandalkan, tetapi pemilik *stakeholder* (pemangku kepentingan) harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh auditor atas pos yang dikecualikan agar tidak menjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Opini tidak memberikan pendapat merupakan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini oleh auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan/atau sistem pengendalian intern dalam suatu pemerintahan yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran.

Adapun opini tidak wajar merupakan opini yang diberikan jika sistem pengendalian internal pada suatu pemerintahan tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah diatur.

Badan Pemeriksa keuangan telah menyampaikan pula semester I tahun 2015 terkait ikhtisar hasil pemeriksaan. Berikut tabel-tabel hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 1.2
Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2015

Pemerintahan/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan
Pemerintah Pusat	117	1637
Pemeriksaan Keuangan	97	1519
PDTT	20	118
Pemerintah Daerah	518	8.019
Pemeriksa Keuangan	504	7.888
Pemeriksa Kinerja	3	17
PDTT	11	14
BUMN dan Badan Lainnya	31	498
Pemeriksa Keuangan	6	66
Pemeriksa Kinerja	2	23
PDTT	23	409
Total	666	10.154
Pemeriksa Keuangan	607	9.473
Pemeriksa Kinerja	5	40
PDTT	54	641

Sumber : www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2015

Tabel 1.3
Hasil Rekapitulasi Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah & BUMD	
	Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Kelemahan SPI				
SPI	1.180	-	6.034	-
Ketidapatuhan Terhadap Peraturan				
Kerugian	522	544.110,32	2.462	1.554.721,52
Potensi Kerugian	83	1.335.777,21	343	9.952.772,88
Kekurangan Penerimaan	187	6.765.236,33	911	396.765,31
Sub Total	792	8.645.123,86	3.716	11.904.259,71
Penyimpangan Administrasi	548	-	2.387	-
Ketidakhematan	3	14.249,16	5	2.492.534,03
Ketidakefisienan	1	-	-	-
Ketidakefektifan	11	139.383,37	28	167,01
Sub Total	563	153.632,53	2.420	2.492.701,04
Total Ketidapatuhan	1.355	8.798.756,39	6.136	14.396.960,75
Total	2.535	8.798.756,39	12.170	14.396.960,75

Sumber :www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2015

Tabel 1.4
Pernyataan Opini Hasil Pemeriksaan BPK

Keterangan Opini	Pemerintah Pusat (dalam persentase)		Pemerintah Daerah (dalam persentase)	
	2013	2014	2013	2014
Wajar Tanpa Pengecualian	74,42%	70,93%	33,55%	49,8%
Wajar Dengan Pengecualian	22,09%	20,93%	60,3%	45,64%
Tidak Memberikan pendapat	3,49%	8,14%	3,94%	3,77%
Tidak Wajar	-	-	1,97%	0,79%

Sumber :www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2014-2015

Pada tabel 1.2 terdapat 8.019 temuan dari 518 laporan hasil pemeriksaan pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Total

pada semester I tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan telah mengeluarkan 666 laporan hasil pemeriksaan dengan 10.154 temuan. (BPK, 2015) menyatakan bahwa 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan pada semester I tahun 2015. Permasalahan tersebut meliputi 7.544 (48,88%) permasalahan yang terjadi karena kelemahan sistem pengendalian internal pada suatu instansi pemerintahan dan 7.890 (51,12%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp33,46 triliun.

Pada tabel 1.3 terdapat penjelasan bahwa masalah ketidakpatuhan yang berdampak *financial* terjadi pada pemerintah pusat sebanyak 792 (17,18%) dengan permasalahan senilai 8,65 triliun rupiah. Permasalahan paling banyak berada pada pemerintah daerah yang mencapai 3.716 (80,61%) dengan permasalahan senilai 11,9 triliun rupiah.

Pada tabel 1.4 masih banyaknya opini selain wajar tanpa pengecualian yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tahun 2014, opini tidak wajar yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mencapai 0,79%, sedangkan opini tidak memberikan pendapat mencapai 3,77% dan wajar dengan pengecualian mencapai 45,64%.

Permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi permasalahan yang harus dapat diselesaikan. Permasalahan tersebut akan mempengaruhi keterandalan pada nilai informasi laporan keuangan. Agar nilai informasi pada laporan keuangan dapat baik serta dapat diandalkan. Maka, diperlukan adanya sistem pengendalian

internal yang memadai serta dukungan dari kapasitas sumber daya manusia yang ada dan dilengkapi oleh teknologi informasi.

Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern (BPK, 2014). Sistem pengendalian intern pemerintah telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008. Sistem pengendalian internal dikatakan efektif apabila pengendalian internal tersebut telah sesuai dengan peraturan. (PP No. 60 tahun 2008) menyatakan bahwa terdapat 5 unsur dari sistem pengendalian intern pemerintah. Lima unsur tersebut, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan secara menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Sistem pengendalian intern dapat dikatakan baik apabila mampu untuk memberikan keyakinan bahwa akan tercapainya efektivitas dan efisiensi untuk tercapainya tujuan suatu instansi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPK, 2014).

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 menjelaskan terkait 5 unsur dari sistem pengendalian intern pemerintahan. Dalam lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerja, melalui: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai

dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Kegiatan pengendalian dilakukan dengan sesuai karakteristik yaitu: kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah, kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, dan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Informasi dan komunikasi dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah yang wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Serta pemantauan yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Ritonga (2010) dalam Halim dan Amriani (2014) mengatakan bahwa dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah karena banyaknya temuan yang terjadi dikarenakan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Di samping itu, peran dari seluruh pemangku kepentingan termasuk penghasil akuntan yaitu perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya

untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan. Amriani (2014) menyatakan perlunya pelatihan kepada setiap pemangku kepentingan untuk menguatkan komitmen, penguatan kompetensi SDM dan meminimalisasi risiko ketidakandalan data keuangan. Berdasarkan peta pemangku kepentingan, maka training kesiapan implementasi basis akrual dibagi ke dalam 3 (tiga) level, yaitu Level Penentu Komitmen dan Politis, Level Manajerial dan Level Teknis.

Menurut Zetra (2008) menyatakan bahwa permasalahan utama dalam akuntabilitas pada pemerintah daerah yaitu kebanyakan aparatur pemerintah tidak mengikuti perubahan lingkungan pada akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Zetra (2008) menyatakan pula bahwa untuk menumbuhkan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maka perlu untuk dilakukan sebagai berikut: pembentukan sel di masing-masing unit instansi dan menerbitkan surat keputusan dan melakukan sistem penghargaan dan sanksi dan penghargaan. Pertimbangan tersebut karena menurut Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dalam Nurillah (2014) yang menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi merupakan faktor pendukung untuk menciptakan terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan yang memiliki ketepatanwaktuan dalam penyajian serta dapat diandalkan nilai informasi di dalamnya. Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 serta diperkuat dengan munculnya peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2010 yang menjelaskan terkait sistem informasi keuangan daerah. Peraturan tersebut mengatur terkait batas

waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah serta terkait dana perimbangan yang tertunda apabila terlambat dalam melakukan penyampaian.

Setiap tahunnya, volume transaksi pada anggaran pendapatan belanja pemerintah pusat dan daerah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut harus diikuti pula dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Menurut Sugijanto (2012) dalam Indriasaridan Nahartyo (2008), menyatakan bahwa peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu, di zaman sekarang, teknologi telah menyebar luas disertai dengan meluasnya layanan internet untuk mencari wawasan yang tersedia.

Menurut Indriasaridan Nahartyo (2008) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Ketersediaan fasilitas teknologi informasi yang memadai serta pemanfaatan teknologi yang baik akan meningkatkan nilai informasi pada laporan keuangan pemerintah sehingga dalam penyampaiannya dapat memiliki ketepatanwaktuan serta dapat diandalkan. Alasan tersebut didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Rosalin (2011), serta Nurillah (2014).

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 dan 2014 yang mana merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2014 dan 2013 memperoleh pernyataan opini wajar tanpa pengecualian. Begitu pula yang

didapatkan oleh Kabupaten Banjarnegara di tahun yang sama. 2 periode akuntansi secara berturut-turut, Kabupaten Banjarnegara memperoleh pernyataan opini wajar tanpa pengecualian oleh badan pemeriksa keuangan. Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pengungkapan yang lengkap (*Full Disclosure*). Dasar pertimbangan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, akan memberikan kontribusi serta referensi bagi pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Laporan keuangan pemerintah merupakan laporan yang penting untuk dapat menilai kinerja dari suatu pemerintahan. Maka diperlukan nilai informasi yang baik pada laporan keuangan yang disajikan. Dari uraian latar belakang, maka munculah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan di Kabupaten Banjarnegara?
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan di Kabupaten Banjarnegara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Menganalisis kompetensi sumber daya manusia Kabupaten Banjarnegara terhadap nilai informasi laporan keuangan dalam hal ketepatanwaktuan penyajian.
- Menganalisis kompetensi sumber daya manusia Kabupaten Banjarnegara terhadap nilai informasi laporan keuangan dalam hal keterandalan informasi.
- Menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap nilai informasi laporan keuangan dalam hal ketepatanwaktuan penyajian.
- Menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap nilai informasi laporan keuangan dalam hal keterandalan informasi.
- Menganalisis pemanfaatan teknologi di daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap nilai informasi laporan keuangan dalam hal ketepatanwaktuan penyajian.
- Menganalisis pemanfaatan teknologi di daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap nilai informasi laporan keuangan dalam hal keterandalan informasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menganalisis nilai informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

Manfaat yang dapat diambil dari aspek praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan nilai informasi dalam ketepatanwaktuan serta keterandalan laporan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian